

RELASI ANTARA MEDIA LOKAL DAN PENGUASA DAERAH DALAM MENDORONG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DI PROVINSI NTT

Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang¹

ABSTRAK

Pemerintahan Pusat memberi wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Wewenang tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan itu memiliki korelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi di banyak daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang tidak semakin baik. Banyak permasalahan yang terjadi di NTT setelah bergulirnya sistem desentralisasi tersebut. Pemerintahan Daerah Provinsi NTT karenanya perlu dikawal oleh seluruh pihak untuk menjamin tercapainya tujuan dari otonomi daerah. Media lokal yang independen, disemangati oleh idealisme dan manajemen yang baik dapat menjadi entitas penting di daerah. Media lokal tidak hanya memberikan informasi yang akurat tetapi juga mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah. Media lokal menjadi kuat dan memiliki kapasitas untuk mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang baik? Apakah media lokal dapat menjalankan kontrol terhadap pemerintahan di daerah? Apakah media lokal independen berhadapan dengan penguasa dan pemilik modal? Peneliti mengumpulkan data tentang hubungan antara media lokal dan penguasa. Data yang dikumpulkan adalah data teks, data kognisi dan data konteks sosial. Selain melakukan analisis teks, peneliti juga menganalisis kognisi sosial dan konteks sosial. Teks, kognisi sosial dan konteks sosial merupakan komponen integral dalam menganalisis sikap media lokal. Penelitian ini menemukan bahwa realitas media lokal dapat terkooptasi oleh kepentingan pemilik media dan pemerintah daerah. Kondisi demikian menegaskan bahwa media lokal tidak mutlak netral. Karena itu pembaca atau masyarakat harus lebih kritis lagi untuk menilai sikap media.

Kata Kunci : Media Lokal, Penguasa Daerah,

¹Staff Pengajar di Universitas Nusa Nipa Maumere, Flores, NTT

THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL MEDIA AND LOCAL GOVERNMENT IN PROMOTING GOOD LOCAL GOVERNANCE IN THE PROVINCE OF NTT

Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang¹

ABSTRACT

Central Government gave the authority to local governments to manage their own affairs. The authority was contained in Act No.32 of 2004 about Regional Government. The authority had a positive correlation to the improvement of public services and the welfare of society. However, what happened in many areas including in the province of East Nusa Tenggara (NTT) was a public service and welfare of the community which were not getting better. Many problems occurred in the province after the passing of the decentralization system. NTT Provincial Governments there for needed to be corted by all parties to ensure the attainment of the objectives of local autonomy. Independent local media, inspired by idealis mand good management could be an important entity in the region. The local media did not only provide accurate information, but was also able to provide political education for the people in the area. Local media became stronger and had the capacity too versee good local governance. A problem to be revealed in this study is how is the relationship between the local media and local authorities in encouraging good local governance? Could the local media exercise the control to the government tin the area? Was a local media independent enough in dealing with the authorities and the owners of capital? Researchers gathered data on the relationship between local media and authorities. The data collected was text data, the cognitive data and the social context data. In addition to the text analysis, the researcher also analyzed the social cognition and social context. Text, social cognition and social context were an integral component in analyzing the attitudes of local media. This study found that the reality oft he local media could beco-opted by the interests of media owners and local governments. These conditions as serted that the local media was not absolutely neutral. In that case thereader or the public should be more critical to assess the attitude of the media.

Keywords: *Local Media, Local Government*

¹Lecturer of Nusa Nipa Maumere University, Flores, NTT

PENDAHULUAN

Realitas politik di Indonesia mengalami fluktuasi dari masa ke masa. Hanya saja, fakta yang tidak bisa dimungkiri adalah pasca-runtuhnya pemerintahan Orde Baru, sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka. Kebebasan berpendapat termanifestasi dari adanya kebebasan pers. Kalau sebelumnya pers sangat dikontrol oleh pemerintah, setelah itu terdapat fenomena tentang menguatnya kontrol pers kepada pemerintah (Marijan, 2010:120).

Banyak sekali persoalan politik yang menjadi perhatian media. Keterkaitan hubungan media dengan ideologi dan dinamika politik suatu negara pernah diungkapkan oleh M.Rooij, mantan Pemimpin Redaksi *de Nieuwe Rotterdamse Courant*. Menurutnya, ideologi yang berlaku di negara tempat sebuah koran atau media hadir dan beroperasi lambat laun akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan koran atau media (Sularto, 2011:18).

Bagaimana hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah? Pertanyaan ini menjadi penting ketika berlaku UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. UU itu memberi kewenangan penuh kepada penguasa di daerah. Kewenangan itu sesungguhnya memiliki korelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi yang terjadi di banyak daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang

tidak semakin baik. Banyak permasalahan yang terjadi di NTT setelah bergulirnya sistem desentralisasi tersebut. Pemerintahan Daerah Provinsi NTT karenanya perlu dikawal oleh seluruh pihak untuk menjamin tercapainya tujuan dari otonomi daerah.

Hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah dapat dikaji dari perspektif komunikasi dan perspektif kritis. Dari perspektif komunikasi, kita dapat melihat pola-pola komunikasi antar institusi ataupun pola komunikasi interpersonal yang diwarnai oleh situasi budaya setempat. Sejauh mana proses negosiasi, proses kreatif, pembaharuan dan tantangan terjadi antara media lokal dan penguasa di daerah. Hal ini dilihat sebagai dampak dari berlakunya otonomi daerah. Tentu saja setiap daerah memiliki kekhasannya tersendiri kendati permasalahan bisa saja sama.

Dari perspektif kritis, hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah dapat dianalisis dari konteks sejarah, ekonomi, politik dan wacana yang berkembang (Martin dan Nakayama, 2004:152). Pola-pola hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah, dalam hal ini di wilayah Provinsi NTT dapat dilihat melalui teks media, konteks sosial dan kognisi para jurnalis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Pengumpulan data dilakukan dengan menempuh langkah: 1). Data yang digunakan

adalah data tahun 2009-2010. Data ini yang berhasil didapatkan penulis melalui kliping editorial koran *Flores Pos*. Data tahun 2011-2012 belum dapat diberikan atau dikumpulkan secara lengkap oleh penulis hingga tulisan ini dibuat. 2). data tahun 2009-2010 masih relevan karena pada tahun tersebut tingkat korupsi di Provinsi NTT cukup signifikan.

PEMBAHASAN

Hubungan antara Media Lokal dan Penguasa di Daerah sebagai Proses Negosiasi; NTT termasuk 10 besar provinsi termiskin di Indonesia yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTT, NTB, Aceh, Lampung dan Bengkulu (SinlaEloE, 2010).

Selain miskin NTT juga memiliki masalah korupsi yang bervariasi. Berdasarkan modusnya, bentuk korupsi di NTT meliputi: *mark up* 24 persen, manipulasi 21,6 persen, penggelapan 20 persen, penyelewengan anggaran 13,6 persen, memperkaya diri sendiri/orang lain 10,4 persen, pengerjaan proyek tidak sesuai bestek 8 persen, dan *mark down* 2,4 persen (Kewa Ama, 2010: 22).

Kondisi NTT seperti disebutkan di atas memunculkan plesetan atas akronim NTT sebagai “Nusa Tetap Terkorup”. Itulah julukan yang paling pantas diberikan untuk NTT apabila fenomena korupsi di provinsi ini dicermati secara jujur. Publik di NTT sudah lama dililit penderitaan oleh kemiskinan dan korupsi. Dengan kata

lain, kemiskinan dan korupsi sangat relevan untuk dibicarakan bila dikaitkan dengan provinsi yang satu ini (SinlaEloE, 2010:1).

Berhadapan dengan realitas NTT yang miskin dan korup maka kehadiran media lokal menjadi penting. Baik *Pos Kupang* maupun *Flores Pos* yang dikenal dan dibaca oleh masyarakat di Provinsi NTT, diharapkan dapat memainkan perannya, tidak hanya dalam memberikan informasi tetapi juga dapat mengambil sikap sebagai bentuk kontrol masyarakat sipil atas jalannya roda pemerintahan daerah yang bersih.

Sikap surat kabar daerah dapat ditemukan dalam rubrik editorial. Rubrik ini menyampaikan sikap secara lugas dari sebuah institusi media terhadap fenomena, isu, atau fakta yang sedang terjadi di tengah masyarakat di mana surat kabar daerah itu berada.

Apa yang media lokal sajikan baik melalui rubrik editorial maupun berita-beritanya hendaknya merupakan bentuk negosiasi antara rakyat dan pemerintah daerah. Hal ini karena telah terjadi konflik antara masyarakat dan penguasa. Konflik yang terjadi diidentifikasi oleh media lokal melalui berbagai pemberitaan dan editorials. Konflik yang dominan disebabkan oleh tingkat korupsi yang tinggi dan kemiskinan yang terus meluas (Martin dan Nakayama, 2004:376-379).

Korupsi bagi masyarakat di Provinsi NTT telah menjadi momok. Bahkan korupsi bukan hanya sesuatu yang kronis, tetapi juga ironis karena terjadi di daerah yang tergolong miskin. Ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga,

sudah miskin, korupsi pula (SinlaEloE, 2010).

Akibat dari tindak korupsi tersebut di atas, maka masyarakat kebanyakan di wilayah NTT akan mengalami efek buruk yang langsung bertalian dengan korupsi, seperti: kemiskinan, gizi buruk, angka putus sekolah yang tinggi, serta pengangguran yang kian marak.

Pelaku tindak korupsi di NTT bervariasi. Umumnya para pelakunya adalah kalangan menengah ke atas, yaitu para pejabat pemerintahan daerah (gubernur, walikota/bupati, kepala dinas, camat, kepala desa dan staf pemerintahan daerah lainnya), anggota DPRD, polisi, jaksa, hakim, pengurus partai politik, para pengusaha, bahkan para guru dan kepala sekolah pun terlibat dalam masalah korupsi di NTT.

Baik *Flores Pos* maupun *Pos Kupang* memiliki sikap resmi sebagai sebuah institusi pers terhadap setiap permasalahan yang terjadi di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Namun yang ingin diteliti dan dikaji lebih dalam oleh peneliti adalah sikap kedua surat kabar daerah tersebut berhadapan dengan masalah korupsi yang terjadi di Propinsi NTT.

Sikap sebuah institusi pers sangat perlu untuk diketahui baik oleh penguasa maupun oleh rakyat. Karena sikap sebuah institusi pers merupakan bagian dari upaya atau perjuangan yang secara sadar dan cerdas dilakukan untuk memajukan masyarakat. Sikap institusi tersebut dapat dilihat dalam rubrik editorialnya.

Editorial *Flores Pos* dikenal dengan nama “Bentara”. Mengapa

disebut “Bentara”, tentu ada alasannya. Alasan atau pun latar belakang nama “Bentara” untuk rubrik editorial *Flores Pos*, memiliki makna filosofisnya yaitu pembawa kabar (sabda). Makna ini tentu saja sejalan dengan semangat (spirit) yang ada dalam diri Serikat Sabda Allah (*Societas Verbi Divini/SVD*) Provinsi Ende selaku pemilik surat kabar harian *Flores Pos*, yakni mewartakan kabar gembira kepada seluruh umat manusia.

Nama “Bentara” yang dipakai sebagai nama untuk editorial *Flores Pos* saat ini sesungguhnya memiliki makna filosofis dan keterkaitan historis sesuai dengan penjelasan tersebut di atas. “Bentara” *Flores Pos* merupakan sikap resmi *Flores Pos* terhadap sebuah isu atau pun kejadian atau fakta yang sedang “memanas” baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. “Bentara” *Flores Pos* merupakan juga pedoman ke mana peliputan berita harus diarahkan.

Penulis rubrik “Bentara” pada *Flores Pos* adalah seorang wartawan senior sekaligus menjabat sebagai pemimpin redaksi pada surat kabar tersebut. Dia adalah Frans Anggal. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana di bidang filsafat pada Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Flores, NTT. Frans Anggal menulis “Bentara” seorang diri. Hanya dia sajalah yang dipercayakan untuk menulis rubrik “Bentara”. Kecuali jika ia berhalangan, maka pemimpin umum mengambil kebijakan dengan menentukan orang lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Kebijakan dalam menentukan satu orang saja yang

menjadi penulis editorial *Flores Pos* diambil dengan alasan agar sikap media sebagai sebuah institusi pers tidak membias dan berubah-ubah sesuai perspektif orang yang berbeda-beda.

Masalah korupsi di wilayah NTT selalu diangkat dalam rubrik editorial *Flores Pos*. *Flores Pos* mau menunjukkan sikapnya yang jelas menolak praktek korupsi dengan segala bentuknya maupun siapa pun orangnya baik di tingkat daerah (kabupaten) maupun tingkat propinsi. Dengan ini *Flores Pos* berkomitmen menunjukkan sikap menolak praktek korupsi di NTT sekaligus bertujuan menyadarkan pembaca *Flores Pos* bahwa korupsi dalam bentuk apa pun harus ditolak di NTT.

Tujuan lain dengan diangkatnya masalah korupsi di NTT dalam editorial *Flores Pos* adalah mau mengubah pandangan masyarakat (*mindset*) untuk tidak menerima nasibnya sebagai orang miskin di daerah tertinggal, tetapi harus bangkit untuk mengubah nasibnya sendiri, di antaranya dengan melawan praktik korupsi.

Sikap *Flores Pos* sebagai institusi media (pers daerah) terhadap korupsi di NTT adalah menentang dengan tegas tindakan korupsi sebagai bentuk kejahatan terhadap rakyat yang menambah kemiskinan rakyat. *Flores Pos* juga dengan lugas dan tegas membela kepentingan rakyat dan mendorong proses penegakan hukum bagi para aktor korupsi (koruptor) yang adalah para pejabat di daerah baik eksekutif maupun legislatif.

“Salam” adalah nama yang diberikan untuk rubrik editorial pada

surat kabar *Pos Kupang*. Seperti “Bentara” pada *Flores Pos* memiliki makna filosofis, nama “Salam” untuk rubrik editorial pada *Pos Kupang* pun memiliki makna filosofis. “Salam” artinya *Pos Kupang* hendak menyapa para pembacanya.

Pos Kupang tentu punya caranya sendiri untuk menyapa para pembaca. Melalui rubrik “Salam”, *Pos Kupang* sebagai sebuah institusi pers daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur mengambil sikap kritis namun dengan cara yang halus, santun. Pesan yang disampaikan melalui “Salam” harus tetap kuat.

Pos Kupang dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah setempat berupaya menunjukkan warna khasnya melalui pilihan kata yang tidak menghakimi atau menuduh tetapi dengan mengambil posisi “pembaca”, *Pos Kupang* menyampaikan sikapnya dalam rubrik “Salam”. “Salam” adalah sikap terakhir dari media (*Pos Kupang*) terhadap fakta atau fenomena sosial yang sedang terjadi.

“Salam” ditulis oleh para redaktur senior *Pos Kupang* secara bergilir. Namun yang paling sering mendapat tugas menulis editorial *Pos Kupang* adalah Tony Kleden. Tony Kleden bekerja di *Pos Kupang* sejak tahun 1996 sebagai seorang reporter. Ketika itu *Pos Kupang* masih berusia 4 tahun. Tidak lama bagi seorang Tony Kleden untuk mendapat kepercayaan sebagai salah seorang redaktur di *Pos Kupang*. Pada tahun 1997, ia dipercayakan sebagai redaktur pendidikan dan kota. Tony Kleden yang berlatarbelakang pendidikan sarjana

filsafat ternyata memiliki bakat di bidang tulis-menulis. Karena itu pula lah ia mendapat kepercayaan sebagai penulis kolom editorialnya *Pos Kupang*.

“Salam” memiliki ruang yang sempit. Terdiri atas 70 baris, sehingga membutuhkan keahlian dan kecerdasan dalam membuat pilihan kata yang tepat guna menunjukkan konteks tanpa perlu mengulang-ulang berita yang sudah dilansir tetapi segera menunjukkan sikap yang jelas dari sebuah institusi pers daerah yang bernama *Pos Kupang* terhadap berbagai fakta dan fenomena sosial yang terjadi. Salah satunya adalah masalah korupsi di daerah miskin, NTT.

Sikap *Pos Kupang* sebagai salah satu institusi media (pers daerah) di NTT adalah menolak praktik korupsi dalam bentuk apa pun yang menyebabkan kemiskinan bagi rakyat. *Pos Kupang* tetap menjalankan fungsi kontrolnya terhadap jalannya tata pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Para pejabat daerah baik eksekutif maupun legislatif mendapat sorotan dari *Pos Kupang*, dalam rangka menjalankan fungsi kontrol pers.

Kedua surat kabar (media lokal) tersebut di atas telah melakukan proses negosiasi melalui rubric editorialnya. Proses ini penting dilakukan baik oleh media lokal maupun pemerintah daerah sebagai penguasa di daerah untuk menetralkan konflik kepentingan yang dapat berubah menjadi konflik terbuka baik horizontal maupun vertikal.

Tantangan Media Lokal; Tantangan bagi surat kabar daerah untuk bersaing dengan surat kabar daerah lainnya adalah bagaimana landasan idiil yang luar biasa bagusnya

didukung oleh landasan komersial yang meliputi sistem manajemen dan finansial serta tenaga profesional yang handal.

Selain itu kemandirian surat kabar daerah bisa “dinodai” oleh kooptasi kaum penguasa dan pemilik modal yang memiliki banyak uang. Tidak terkecuali para wartawannya yang tergiur oleh “isi amplop” yang ditawarkan oleh kaum pemilik modal atau penguasa. Surat kabar daerah dengan demikian akan gampang menjadi alat ideologi para penguasa dan pemilik modal di daerah. Profesionalisme surat kabar daerah bisa digugat di sini. Inilah tantangan yang dapat dilihat dari hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah.

Perspektif kritis dalam komunikasi transbudaya membantu kita untuk mengkaji permasalahan tersebut di atas (Martin dan Nakayama, 2004:152-153). Hal ini karena komunikasi transbudaya mengkaji relasi-relasi kekuasaan yang terdapat dalam dinamika kelompok-kelompok budaya. Banyak kajian interkultural komunikasi yang berbicara tentang perbedaan kelas, ras, gender, kebangsaan, sexual atau hal-hal yang terdapat dalam masyarakat (Littlejohn dan Foss, 2009: 242).

Flores Pos dan *Pos Kupang* adalah dua surat kabar daerah yang dikenal luas di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua surat kabar ini tentu saja memiliki idealisme dan juga landasan komersial yang khas menurut visi dan misi yang diemban oleh masing-masing surat kabar. Faktor lainnya yang turut menentukan langkah

dan arah perjuangan sebuah surat kabar adalah kepemilikan media (*media ownership*). Hal ini pun pada gilirannya menentukan pula sikap dari surat kabar tersebut berhadapan dengan fakta, isu dan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Di antaranya adalah masalah korupsi.

Atas dasar kesimpulan menurut level analisis di atas, secara mikro ditemukan bahwa aktor yang melakukan kejahatan korupsi di NTT umumnya adalah para pejabat daerah baik eksekutif maupun legislatif. Para pejabat birokrat ini biasanya melakukan kolusi dengan para pengusaha (kontraktor) selain melakukan tindakan yang sama (praktik KKN) dengan oknum penegak hukum.

Pada level meso, terdapat instansi atau dinas pemerintahan dan perusahaan milik daerah yang disebut sebagai “tempat basah”, yaitu tempat di mana terdapat banyak proyek. Uang untuk proyek-proyek inilah yang menjadi objek atau sasaran untuk dikorupsi oleh para aktor korupsi (koruptor) yang memiliki kekuasaan dan akses yang besar.

Pada level makro ditemukan bahwa masyarakat di NTT umumnya tidak mempunyai akses informasi yang cukup bagi mereka guna turut serta mengontrol tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Di sinilah letak pentingnya mengetahui sikap media, dalam hal ini *Flores Pos* dan *Pos Kupang* berhadapan dengan masalah korupsi di NTT.

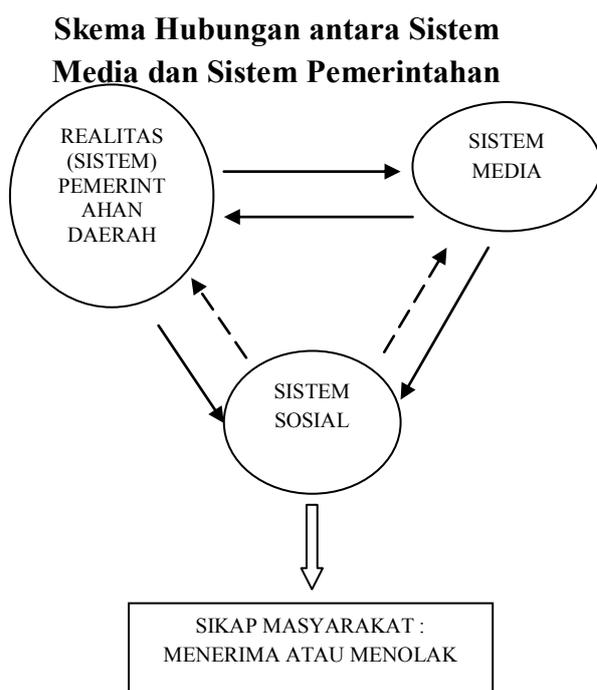
Peran Media Lokal di NTT: Mengembalikan Hak Rakyat; Media lokal terus memberikan tekanan kepada

penguasa lalim dengan berani memberitakan berbagai kebobrokan dan penyimpangan kekuasaan yang telah dibuatnya. Hal ini membangkitkan kesadaran rakyat akan hak-haknya yang telah dicaplok penguasa dan menggalang aksi perlawanan merontokkan kursi kekuasaan para diktator. Rakyat pun bisa keluar dari kerangkeng ketertindasan dan menghirup oksigen kebebasan dan kemerdekaan. Edmund Burke menegaskan kenyataan ini dengan menyatakan bahwa media mewakili suatu sumber pengetahuan mandiri yang tidak hanya menginformasikan kepada rakyat tentang kegiatan politik, tetapi juga melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan (Mc Nair, 2003:47-48).

Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi telah sangat membantu media menemukan berbagai macam cara dan strategi membidik dan menginvestigasi berbagai kebijakan dan tindakan penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh para elit politik dan penguasa yang hendak ditutup-tutupi atau disembunyikan sehingga rakyat terus menuntut pertanggungjawaban moral, politik dan hukum dari padanya. Saat ini tidak ada kebobrokan dalam urusan publik yang dapat disembunyikan karena suatu saat media pasti akan membongkarnya. Harus diakui bahwa cerita sukses perjuangan rakyat menumbangkan para diktator di berbagai belahan dunia dan terbongkarnya berbagai kebobrokan penyelenggaran kekuasaan di negeri ini adalah cerita sukses atas peran yang dimainkan media.

Media lokal sebagai institusi dan pekerja media sebagai subyek harus tetap menampilkan diri sebagai media dan pekerja media yang bebas dan independen disertai keberanian moral untuk tidak “dibeli” oleh para pemilik modal dan pemegang kuasa. Media lokal harus bekerja dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga akuntabilitasnya dapat ditakar oleh masyarakat dan penguasa di daerah.

Perspektif kritis dalam komunikasi transbudaya (*intercultural communication*) membantu kita untuk melihat lebih dalam tentang relasi antara media lokal dan penguasa di daerah. Perspektif kritis tersebut mendorong dilakukannya investigasi terhadap kelompok-kelompok marginal atau kelompok yang ditindas dan menguji kekuasaan yang digunakan dalam relasi *intercultural* (Littlejohn dan Foss, 2009: 242). Berikut ini, skema hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah pasca bergulirnya UU Otonomi Daerah.



Keterangan : Antara realitas (sistem) politik di daerah dan sistem media lokal, keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Sebuah realitas politik yang muncul dapat mempengaruhi sistem media. Demikian pun sistem media dapat mengontruksi realitas politik bahkan dapat membentuk sistem politik yang baru (dari sistem otoritarian/demokrasi dipimpin berubah menjadi sistem yang lebih terbuka/demokratis). Baik sistem politik maupun sistem media, keduanya mampu mempengaruhi sistem sosial. Terbentuk pranata-pranata sosial baru, seperti gerakan *civil society* (LSM), kaum buruh, kelompok aktivis kampus, dan lain-lain. Sistem sosial inilah yang akan mempengaruhi sikap masyarakat/publik. Masyarakat dapat menentukan sikap mereka, menerima atau menolak program-program pemerintah atau figur tertentu dalam percaturan politik. Sistem sosial akan dapat mempengaruhi sistem media dan sistem politik, namun kurang tegas pengaruhnya yang ditunjukkan dengan panah dengan garis putus-putus. Di Indonesia, sistem media dan sistem politik sangat dominan mempengaruhi sistem sosial. Konsep ideologi sebagai kesadaran palsu dapat dimainkan oleh media dan penguasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Otonomi daerah telah menciptakan realitas pemerintahan daerah yang menjadi komoditi dalam sistem media. Namun antara realitas

- (sistem) pemerintahan daerah dan sistem media, keduanya dapat saling mempengaruhi.
2. Perspektif kritis dalam kajian komunikasi transbudaya (*intercultural communication*) sangat membantu dalam melakukan investigasi terhadap kelompok-kelompok marginal atau kelompok yang ditindas. Selain itu, perspektif kritis tersebut menguji kekuasaan yang digunakan pemerintah daerah dan relasinya dengan masyarakat di Provinsi NTT. Media lokal, dalam hal ini *Flores Pos* dan *Pos Kupang* menjadi saluran yang dipakai untuk mengembalikan hak-hak rakyat NTT yang telah dirampas melalui korupsi.
 3. Kemampuan media lokal untuk mengembalikan hak rakyat dan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang baik tidak terlepas dari profesionalisme dan didukung dengan sikapnya yang kritis. Hal ini karena hubungan antara media lokal dan penguasa di daerah bersifat rumit, kompleks dan terikat oleh kultur tertentu. Namun kemampuan berkomunikasi transbudaya akan membantu memberikan sejumlah jalan keluar.

Saran

1. Media lokal hendaknya tetap berperan sebagai instrumen sosial yang mencerahkan masyarakat agar menjadi warga yang cerdas dan kritis sehingga

bisa membangun demokrasi yang substantif dalam sistem pemerintahan kita. Bila media mengingkari perannya ini, rakyatpun akan semakin kritis menilai pemberitaan dan informasi yang disajikan media sehingga hal itu akan menjadi taruhan bagi bertahan atau tidaknya sebuah media.

2. Fenomena kepemilikan media lokal menjadi objek kajian yang tetap menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Hal ini karena produk media dapat dipengaruhi oleh faktor kepemilikan media (*media ownership*).
3. Peran media dan sistem politik hendaknya memperkuat eksistensi warga masyarakat untuk menggapai kesejahteraan. Jangan sampai media dan sistem politik di Indonesia hanya bermanfaat untuk kalangan elit baik elit media maupun elit penguasa untuk meraup untung sebesar-besarnya, sementara rakyat terus terpuruk dalam penderitaan dan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kewa Ama, Kornelis. 25 Mei 2010. "Gurita Korupsi di Daerah Miskin". *Kompas*, hlm. 22.
- Latif, Yudi dan Idi Subandi Ibrahim. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. (eds). 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*. California: Sage Publications.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martin, Judith N. dan Thomas K. Nakayama. 2004. *Intercultural Communication in Contexts*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- McNair, Brian. 2003. *An Introduction to Political Communication (Third Edition)*. New York: Routledge.
- McQuail, Dennis. 2000. *Mass Communication Theory (Fourth Edition)*. London: Sage Publication.
- SinlaEloE, Paul. (2010,25 Oktober). *Korupsi dan Pemberantasannya di Propinsi Miskin*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Pemuda Antikorupsi di, Jakarta.
- Sularto, St. 2011. *Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.